

LAMPIRAN

LAMPIRAN

1. Kerangka Acuan Round Table Discussion

Kerangka Acuan
Round Table Discussion
**“PERSPEKTIF PENGUSAHA HUTAN DALAM MENYIKAPI KASUS-KASUS TENURIAL DI UNIT
PENGUSAHAAN HUTAN PRODUKSI”**
Diselenggarakan atas kerjasama antara APHI dan WG-tenure
Selasa, 22 Februari 2005

1. Latar Belakang

Tingginya intensitas konflik sosial dan berkepanjangan di unit-unit pengelolaan hutan baik hutan alam maupun hutan tanaman menunjukkan adanya persoalan mendasar dalam sistem pengelolaan sumberdaya hutan yang belum dibenahi secara proporsional. Muhshi (1999) dan Astana, (2004) menyatakan bahwa sejak tahun 1990 sampai dengan 1996 tercatat jumlah konflik di unit-unit Hutan Tanaman saja mencapai 5750 kali. Selanjutnya intensitas konflik sejak era reformasi 1997/1998 sampai tahun 2003 meningkat secara drastik dan diperkirakan di unit-unit hutan tanaman dan hutan alam lebih dari 10.000 konflik dengan sumber konflik yang memiliki ciri persoalan fundamental yang relatif sama.

Pendekatan-pendekatan yang dilakukan dalam resolusi konflik sosial di kawasan unit pengelolaan hutan, baik IUPHHK maupun unit pengelolaan Hutan Tanaman (HT) sampai saat ini belum menunjukkan progress kemajuan secara komprehensif untuk menjawab persoalan-persoalan mendasar yang melatar belakangi konflik tersebut. Inisiatif lokal dalam resolusi konflik merupakan kreatifitas-pragmatis di unit pengelola hutan produksi telah banyak dilakukan oleh para pengusaha, pemerintah maupun lembaga-lembaga masyarakat yang ada. Namun pada faktanya usaha tersebut merupakan solusi jangka pendek dimana potensi konflik susulan dalam pengusahaan dan penguasaan atas lahan hutan sangat mungkin terjadi setiap saat jika terdapat faktor pemicunya.

Tentu saja hal ini merupakan ancaman investasi dalam sektor bisnis pengusahaan hutan disatu sisi, sedang disisi lain ketidakpuasan dan perasaan marjinalisasi peran dalam pengelolaan sumberdaya bagi masyarakat tetap berkembang.

Sementara itu aspek legal kebijakan berkaitan dengan persoalan penguasaan lahan yang mengarah pada konflik lahan belum mampu menjadi tumpuan harapan baik bagi masyarakat lokal maupun bagi pengusaha.

Untuk mencapai solusi yang lebih baik dan mampu mengakomodasi berbagai kepentingan baik pengusaha maupun masyarakat lokal, maka proses diskusi perlu dilakukan baik untuk menjaring perspektif swasta secara murni berdasarkan pemikiran dan pengalaman-pengalaman lapangan terhadap persoalan-persoalan terkait persoalan tenurial yang mengarah pada konflik sosial maupun perspektif masyarakat serta pemerintah.

Working Group Tenure (WGT) merupakan sebuah kelompok kerja multipihak yang terdiri dari wakil swasta, pemerintah, masyarakat dan lembaga non-pemerintah yang bersifat independen, yang dibentuk oleh pemerintah beserta mitra-mitranya untuk melakukan inisiasi penyelesaian masalah-masalah penguasaan pertanahan dikawasan hutan. Penyelesaian masalah-masalah pertanahan tersebut disamping merupakan komitmen pemerintah kepada *Consultative Group on Indonesia (CGI)* yang tertuang dalam komitmen 11 (1 Februari 2000) juga merupakan TAP MPR no IX tahun 2001 yang memandatkan kepada DPR dan pemerintah untuk melakukan pengkajian berkaitan dengan

pengelolaan sumber daya alam, penyelesaian konflik dan menata kembali sistem tenurial sumberdaya hutan guna tercapainya **kepastian dan perlindungan hukum**, serta keadilan dan kemakmuran seluruh rakyat Indonesia.

Untuk itu *WGT* akan bekerjasama dengan berbagai pihak dalam melakukan langkah-langkah secara menyeluruh dalam proses inisiasi penyelesaian persoalan-persoalan penguasaan pertanahan sebagai pelaksanaan tugas yang dimandatkan pemerintah tersebut.

Langkah awal berupa diskusi internal baik di kelompok masyarakat dan pengusaha serta pemerintah secara sendiri-sendiri dipandang akan lebih baik untuk mengkonsolidasikan pandangan-pandangan masing masing pihak terhadap persoalan yang menjadi topik bahasan tanpa terpengaruh pihak-pihak lain dalam mengkonsolidasikan fikiran-fikiran dan langkah serta pengembangan pilihan-pilihan solusi yang dapat ditawarkan didasarkan pengalaman lapangan dalam mengembangkan resolusi konflik.

Langkah selanjutnya, ketika perspektif swasta, masyarakat maupun pemerintah sudah teridentifikasi, maka diskusi multipihak perlu dilakukan untuk *menyamakan persepsi, asumsi, dan sasaran serta strategi* dalam proses untuk *memformulasikan persoalan*, serta langkah-langkah solusi multipihak yang menjadi kesepakatan bersama.

Diskusi akan diawali secara internal dalam lingkup pengusaha hutan, baik hutan alam maupun hutan tanaman untuk menjaring bagaimana perspektif swasta tentang persoalan tenurial serta apa usulan-usulannya secara kongkrit untuk menjadi bahan diskusi dalam proses diskusi panel multipihak.

Untuk itu maka *Working Group Tenur (WGT)* dan Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) akan melakukan kerja sama untuk melakukan identifikasi masalah-masalah terkait tenurial tersebut sebagai wujud kongkrit dalam mendorong, memfasilitasi dan menciptakan iklim kondusif menuju hakekat pengelolaan hutan lestari di Indonesia untuk kesejahteraan rakyat secara umum. Kerjasama tersebut akan dilakukan melalui penyelenggaraan diskusi (*round table discussion*) secara internal diantara para pengusaha hutan baik hutan alam maupun hutan tanaman.

2. Tujuan

Tujuan penyelenggaraan *round table discussion* ini sebagai berikut:

- a. Mengidentifikasi permasalahan, pandangan dan pengalaman pihak pengusaha dalam menghadapi dan mengelola kasus-kasus tenurial di wilayah atau unit kerjanya.
- b. Merumuskan agenda kegiatan tindak lanjut yang diharapkan berupa peran atau mandat kepada *WGT* untuk resolusi konflik kasus-kasus tenurial tersebut

3. Hasil yang diharapkan

Hasil yang diharapkan dari hasil diskusi ini, dari perspektif swasta, adalah sebagai berikut:

- a. Teridentifikasinya kasus-kasus tenurial di unit kerja pengusaha (HPH&HHTI), serta pandangan dan pengalaman pengusaha dalam menghadapi dan mengelola kasus-kasus tersebut.
- b. Desain agenda kerja tindak lanjut dari hasil diskusi
- c. Peran yang diharapkan dari *WGT* untuk mendukung resolusi konflik-konflik tenurial di unit usaha HPH&HTI

4. Jadwal Kegiatan

ROUND TABLE DISCUSSION

Selasa, 18 Januari 2005

08.00 – 09.00	Panitia	Registrasi
09.00 – 09.30		Pembukaan oleh WG-Tenure & APHI
	MC: Erna	
09.30 – 11.00	Martua Sirait	Presentasi Pemerintah ¹ , APHI Dan WG-Tenure tentang persepektif masing-masing terhadap masa depan pengelolaan Sumber Daya Hutan berkaitan dengan aspek tenurial.
11.00 – 13.00	Fahrozi, (APHI)	Presentasi dan diskusi dengan tema “ <i>pengalaman dan pemikiran unit pengelolaan hutan dalam pengembangan resolusi konflik di masing-masing unit</i> ” ² - PT. Intraca-Kaltim - PT. Finantara-Kalimantan Barat - PT Alas Kusuma-Kalimantan Barat - PT. Korindo-Papua
13.00-14.00	Panitia	ISHOMA
14.00 – 16.00	Suwito, Rukmantara	<i>Diskusi Tindak lanjut</i> - <i>review hasil identifikasi</i> - <i>diskusi tindak lanjut WGT</i> -

Notulis : APHI sekretariat

5. Tempat Pelaksanaan

Rond table discussion ini dilaksanakan bersama oleh Sekretariat Working Group Tenurial & Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) yang akan diselenggarakan di Gedung Manggala Wanabakti Jl. Jendral Gatot Subroto-Jakarta.

Alamat Sekretariat WG Tenurial

Gedung Badan Planologi Kehutanan , Jl. Juanda 100 Bogor , telp +62-251-384381

Email: wg_tenurial@cbn.net.id.

Kontak Person: Wito, Rukmantara

Alamat Sekretariat APHI

Gedung Manggala Wanabakti Blok IV lantai 5

Jl. Gatot Subroto-Senayan

Jakarta 10270

Telp : 021-5734395

Kontak person : Erna Mardiana, Rukmantara

7. Fasilitator Pelaksanaan dan Fasilitator Diskusi

Kegiatan ini akan di fasilitasi oleh Sekretariat WG-Tenure dan Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI), sedangkan fasilitator diskusi akan ditetapkan kemudian.

¹ Pemerintah akan diwakili oleh Kepala Badan Planologi dan Dirjen BPK

² Lihat *Term of Reference*

8. Peserta Diskusi

Peserta diskusi terdiri dari wakil-wakil pengusaha hutan baik hutan alam maupun hutan tanaman terutama yang telah memiliki pengalaman dalam pengembangan model-model resolusi konflik di lokasi unit pengelolaannya dan dapat merepresentasikan masing-masing wakil unit pengelolaan hutan.

Disamping itu peserta diskusi dihadiri oleh beberapa peserta dari Departemen Kehutanan Ditjen Planologi dan Bina Produksi Kehutanan.

Jumlah peserta dan fasilitator diskusi secara keseluruhan sekitar 30 peserta.

Daftar Undangan Peserta *Round table discussion*
Kerjasama WG TENURE & ASOSIASI PENGUSAHA HUTAN INDONESIA
Jakarta, 22 Februari 2005.

1. PT. Barito Pacific Timber Group
2. PT. Benua Indah Timber Group
3. PT. Djajanti Timber Group
4. PT. Daya Sakti Timber Group
5. PT. Hutrindo Wanabangun Timber Group
6. PT. Indah Kiat Timber Group
7. PT. INHUTANI I
8. PT. INHUT ANI II
9. PT. INHUT ANI III PT. INHUTANIIV
10. PT. INHUT ANI V
11. PT. ITel Timber Group
12. PT. KLI Timber Group
13. PT. Korindo Tbr Group
14. PT. RGM Timber Group
15. PT. Sumalindo Tbr Group
16. PT. Smya Satria Timber Group
17. PT. Tanjung Johor Tbr Group
18. PT. Tanjung Raya Tbr Group
19. PT. Uniseraya Tbr Group
20. PT. WIKI
21. PT. MujurTbrGroup
22. PT. Erna Djulawati
23. PT. Roda Mas Group
24. PT. Hanurata Group
25. PT. Nusantara Energi Group
26. PT. Sumber Mas Group
27. PT. Jati Group
28. PT. Prabu Alaska Group
29. PT. Batasan Group






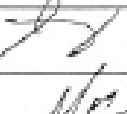
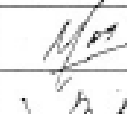
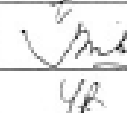
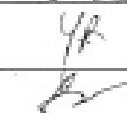













Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia

Daftar Hadir

Roundtable Discussion Internal Pengusaha Hutan Dalam Upaya Penyelesaian Konflik Sosial Yang Berkaitan Dengan Pertanahan di Unit Pengelolaan Hutan

Ruang Pertemuan ISWA/BRUK, Gd. Manggala Wanabakti Blok IV Lt.8 Wing C
22 Februari 2005

No	Nama	Instansi/Perusahaan	Tanda Tangan
1.	Haru Basuki S	PT. Entracawood Adfg	
2.	Mopy Tjandjono	—	
3.	Henry Rouyikain	Finmantara hutig	
4.	BALSIKSEN	KLI.	
5.	Muhar S.	PT. Teraki	
6.	Abi Imanus	PT. Gajah Putih	
7.	Clus K.	KLI.	
8.	SUWITO	WG TENURE	
9.	Ethy Babaro	PT. THL	
10.	Putri Tjatur B.	PT. THL	
11.	Rachmat R	PT. KLI	
12.	Abidin A.	PT. TRH	
13.	LISTYA	Pomplau	
14.	SUTOMO	PT. INHUTANI - 2	
15.	Tyot N.P.	PT. Gunung Meranti	
16.	Pachonno	Djengal PK	
17.	FRANCOIS A.H.	APHI	
18.	DEL TOGA H.	BISMA SUTERA GROUP	
19.	DIAN	—	

No	Nama	Instansi/Perusahaan	Tanda Tangan
20.	Denny. k	BPK	
21.	Abdul Hanid	PT. Hanusah	
22.	Silmyoto	PT. Jariha	
23.	Djamar Sih	PT. Jariha	
24.	Hidayat Fitri	PT. Ranggakusuma	
25.	Stanet Riyasi	PT. Jatiharma Indah	
26.	Husni y. Rahma	PT. Pinao muluk. Tono	
27.	Muerian	KORINDO	
28.	Iska - Jar	Korindo	
29.	Sukadhi	PT. Konekura	
30.	Rudiyatna	PT. Lektama II	
31.	Bambang I	PT. Rata M. Tandi	
32.	AGAGAL	KCI	
33.	Benares	PT. RATA M. Tandi	
34.	Marta T. Sipit	ICRAF - SEA	
35.	Planta Jaya	DFID	
36.	Yani	Darya S. S.	
37.	TATA	PT. IKANI	
38.	Purwadi. S	PT. WAKARA S. S.	
39.	A. Faukadi	PT. Hulutani I	
40.	HAN S. S. S.	Land Finance NG	
41.	Noruk Raya	HFP - DFID	



Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia

No	Nama	Instansi/Perusahaan	Tanda Tangan
42.	Hendra Pratiwi	APHI	
43.	Hery Setono	PT. INHUTANI III	
44.			
45.			
46.			
47.			
48.			
49.			
50.			
51.			
52.			
53.			
54.			
55.			
56.			
57.			
58.			
59.			
60.			
61.			
62.			
63.			

**3. DOKUMENTASI PROSES *ROUND TABLE*
*DISCUSSION***
Manggala Wanabakti, 22 Februari 2005 Jakarta

**Persiapan Pembukaan diskusi oleh APhi-WGT Koordinator WGT Memberikan Pemaparan
Visi dan Misi WGT**



Proses diskusi masalah tenurial yang selalu menarik para peserta diskusi dari IUPHH







